



**Ranah Research:**  
Journal of Multidisciplinary Research and Development



082170743613    ranahresearch@gmail.com    <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6)  
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi

Saeful Anwar Rahmatillah<sup>1</sup>, Atik Rochaeni<sup>2</sup>, Noer Apptika Fujilestari<sup>3</sup>, Yamardi<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Jenderal Achmad Yani, [rahmatillahsaefulanwar@gmail.com](mailto:rahmatillahsaefulanwar@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Jenderal Achmad Yani, [neptura.76@gmail.com](mailto:neptura.76@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Jenderal Achmad Yani, [noer.apptika@lecture.unjani.ac.id](mailto:noer.apptika@lecture.unjani.ac.id)

<sup>4</sup> Universitas Jenderal Achmad Yani, [yamardicimahi71@gmail.com](mailto:yamardicimahi71@gmail.com)

Corresponding Author: [rahmatillahsaefulanwar@gmail.com](mailto:rahmatillahsaefulanwar@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This research is entitled "The Effect of the Implementation of the Program Keluarga Harapan Policy on Community Welfare in South Cimahi District, Cimahi City". The research objective is to analyze the impact of the implementation of the Program Keluarga Harapan (PKH) policy on community welfare in Cimahi Selatan District. The method used is a combination (mixed methods) with a sequential explanatory model, involving 154 respondents as samples and informants such as the Head of Linjamsos and PFM, Kasi Linjamsos and PFM, PKH Social Coordinator of Cimahi City, and KPM of South Cimahi District. Data collection techniques include literature study, questionnaires, interviews, and observations, with analysis using product moment correlation techniques. The results showed that the implementation of PKH policy in Cimahi Selatan Sub-district was in the good category, with an average score of 2.64 (88.00%). The dimensions of communication and bureaucratic structure get the highest score (2.67 or 89%), while the resource aspect has the lowest score (2.60 or 86%). For community welfare, the mean score was 2.61 (87.00%), with the prosperous life aspect getting the highest score (2.67 or 89%) and good adjustment getting the lowest score (2.56 or 85%). Hypothesis testing showed a p-value of 0.04 (<0.05), indicating that the research hypothesis is accepted. The magnitude of the effect of PKH policy implementation on community welfare is 0.85 (85%).*

**Keyword:** *Policy Implementation, Community Welfare, Structural Equation Modeling (SEM).*

**Abstrak:** Penelitian ini berjudul "Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi." Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dampak implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan. Metode yang digunakan adalah kombinasi (mixed methods) dengan model sequential explanatory, melibatkan 154 responden sebagai sampel dan informan seperti Kabid Linjamsos

dan PFM, Kasi Linjamsos dan PFM, Koordinator Sosial PKH Kota Cimahi, serta KPM Kecamatan Cimahi Selatan. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, kuesioner, wawancara, dan observasi, dengan analisis menggunakan teknik korelasi product moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PKH di Kecamatan Cimahi Selatan berada dalam kategori baik, dengan skor rata-rata 2.64 (88.00%). Dimensi komunikasi dan struktur birokrasi mendapatkan nilai tertinggi (2.67 atau 89%), sementara aspek sumber daya memiliki nilai terendah (2.60 atau 86%). Untuk kesejahteraan masyarakat, nilai rata-rata adalah 2.61 (87.00%), dengan aspek kehidupan sejahtera memperoleh nilai tertinggi (2.67 atau 89%) dan penyesuaian diri yang baik mendapatkan nilai terendah (2.56 atau 85%). Uji hipotesis menunjukkan p-value sebesar 0.04 ( $< 0.05$ ), mengindikasikan bahwa hipotesis penelitian diterima. Besaran pengaruh implementasi kebijakan PKH terhadap kesejahteraan masyarakat adalah 0.85 (85%).

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Kesejahteraan Masyarakat, Structural Equation Modeling (SEM).

---

## PENDAHULUAN

Permasalahan yang sering dihadapi dan diperhatikan oleh negara-negara yang ada di dunia bahkan masalah ini menjadi masalah global yaitu masalah kemiskinan (Sukmana & Ningrum, 2022). Masalah kemiskinan menjadi faktor utama dalam menjadikan Negara tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia adalah salah satu Negara berkembang, dengan berbagai macam masalah sosial yang dihadapi. Salah satunya adalah kemiskinan. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin sebanyak 26,36 juta orang meningkat dari tahun sebelumnya (Statistik, 2023). Oleh karena itu kemiskinan menjadi salah satu faktor utama dalam permasalahan yang ada di Indonesia.

Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan dimana terdapat sejumlah penduduk tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (basic needs) mereka hidup di bawah tingkat kebutuhan minimum tersebut (Herdiawan, Agiati, & Indrakentjana, 2022). Maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan bukanlah hal yang tidak asing bagi Negara Indonesia merupakan masalah yang sudah ada dari sejak jaman dahulu. Kemiskinan bukan hanya faktor segi ekonomi melainkan dari masalah agama, sosial, politik, dan lainnya. Kemiskinan merupakan bagian dari masalah pembangunan, dikarenakan masyarakat tidak memiliki kemampuan dalam mencari sumber mata pencaharian atau sumber pendapatan yang tidak mencukupi, oleh karena itu akan mempengaruhi keterbatasan ekonomi, keterbatasan pendidikan dan keterbatasan dalam memperoleh fasilitas kesehatan. Oleh sebab itu kemiskinan merupakan isu strategis untuk diangkat dalam melakukan perubahan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Sosial merencanakan Program Keluarga Harapan sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan memiliki tujuan akhir yaitu memutus rantai kemiskinan. Secara khusus Program Keluarga Harapan ini dirancang hanya untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Namun pada pengimplementasiannya, Program Keluarga Harapan ini belum berjalan dengan optimal di beberapa daerah khususnya di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Sejalan dengan hal itu Dinas Sosial memiliki tugas, pokok dan fungsi dalam menjalankan roda pemerintahan yang bergerak dalam bidang sosial, dalam peraturan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Sosial Kota Cimahi melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.

Awal mula Program Keluarga Harapan tercantum pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Selain itu, PKH juga mengacu pada Undang-Undang Kesejahteraan Sosial No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Menimbang kedua isi dari peraturan-perundangan tersebut Program Keluarga Harapan yang akhirnya mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 “Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan”. Tujuan diadakan program tersebut untuk meningkatkan taraf kualitas hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam program bantuan sosial bersyarat, Program Keluarga Harapan (PKH) membuka akses kepada keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Bukan hal itu saja Manfaat Program Keluarga Harapan juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Peserta Program Keluarga Harapan diwajibkan melaksanakan beberapa kewajiban yaitu memeriksakan kesehatan ibu hamil/menyusui dan anak usia dini (0-6 Tahun) pada layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan, anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun dengan tingkat kehadiran minimal 85%, dibidang kesejahteraan sosial peserta lanjut usia dan penyandang disabilitas berat wajib mengikuti kegiatan kesejahteraan sosial minimal setahun sekali, serta Keluarga Penerima Manfaat harus mengikuti kegiatan P2K2 (Pedoman Pelaksanaan PKH 2021). Secara umum P2K2 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial dalam lingkup keluarga, sehingga mendorong terciptanya percepatan perubahan perilaku (Pedoman Pelaksanaan PKH, 2021). Besaran bantuan untuk setiap kategori berbeda-beda. Selain itu, tidak semua anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) menerima bantuan karena ada aturan bahwa hanya maksimal empat orang dari KPM PKH yang berhak mendapatkan bantuan. Besaran bantuan dihitung mulai dari nilai bantuan tertinggi.

Dalam penyelenggara kebijakan tersebut Kota Cimahi melaksanakan Program Keluarga Harapan pada tahun 2013 dikarenakan, sebelum menjadi program nasional pada tahun 2007 program PKH hanya sebagai pilot project beberapa wilayah. Dalam penyelenggaraan kebijakan tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi dengan Dinas Sosial Kota Cimahi beserta Pendamping PKH bekerja sama dalam menyelenggarakan kebijakan tersebut dengan tujuan memutus rantai kemiskinan. Dapat dilihat pada tabel kemiskinan di Kota Cimahi pada tahun 2020-2022.

## **METODE**

Peneliti harus menentukan metode penelitian sebelum melaksanakan penelitian untuk memberikan gambaran serta arahan dan pedoman dalam penelitian. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data dan jawaban dari gejala atau fenomena yang menarik perhatian peneliti. Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Menurut (Sugiyono, 2019) mengatakan bahwa: “Metode Penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu” Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method. Mixed methods research design (rancangan penelitian metode campuran) merupakan pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, penggabungan dua bentuk data, dan penggunaan rancangan berbeda yang dapat melibatkan asumsi-asumsi filosofis dan kerangka kerja teoritis (Creswell, 2017).

Selanjutnya Sugiyono dalam (Subakti, Yuliana, Yuliana, & Musywarofah, 2022) menyatakan bahwa:

“Metode penelitian kombinasi (mixed methods) merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan penelitian ini lebih kompleks karena menggabungkan pendekatan secara kuantitatif dan kualitatif, sehingga akan menghasilkan penelitian yang kuat. Data kualitatif yang digunakan meliputi instrumen akan sikap, kinerja atau perilaku. Sedangkan data kuantitatif merupakan informasi yang dianalisis secara statistik yang dikumpulkan dalam suatu dokumen.”

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk jawabnya (Sugiyono, 2019). Menurut Purwanto dalam (Sukarendra & Atmaja, 2020) menyatakan bahwa “Kuesioner merupakan instrumen penelitian yang umumnya digunakan untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang berisi pernyataan-pernyataan yang disusun sedemikian rupa tentang variabel penelitian”.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat yaitu dengan menggunakan skala Likert sebagai skala pengukuran. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2019). Adapun alasan menggunakan angket atau kuesioner tertutup adalah kuesioner tertutup memberikan kemudahan bagi responden dalam memilih jawaban.

### **Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) merupakan cara yang digunakan oleh peneliti guna mengetahui informasi lebih dari responden dengan jumlah responden yang lebih sedikit. Dalam melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur. Wawancara terstruktur artinya saat melakukan wawancara peneliti memiliki pedoman berupa daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk mendapat informasi dari responden. Sedangkan wawancara tidak terstruktur artinya saat melakukan wawancara peneliti tidak memiliki pedoman dalam melakukan wawancara dan bebas melakukan wawancara kepada responden

2. Kuesioner atau angket menurut (Sugiyono, 2019) menyatakan bahwa “Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk jawabnya”.
3. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengumpulan literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dan teori-teori sebagai referensi yang relevan dengan judul penelitian. Menurut (Sugiyono, 2019) “Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
4. Observasi merupakan teknik pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti pada isu-isu yang ditemukan di lapangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid, Kasi Kabid Linjamsos dan PFM Pendamping Sosial PKH, dan Keluarga Penerima Manfaat PKH bahwa indikator pengembangan ekonomi di lingkungan masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan program

keluarga harapan di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi sudah dilaksanakan dengan cukup baik dengan mengedukasi masyarakat melalui kegiatan P2K2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator pengembangan ekonomi di lingkungan masyarakat terkait pelaksanaan program keluarga harapan sudah tersampaikan dengan baik di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan nilai 88,00%, yang dilakukan dengan mengedukasi masyarakat melalui kegiatan P2K2.

Selanjutnya, indikator persamaan hak yang sama dalam melaksanakan kebijakan program keluarga harapan di Di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi disajikan pada tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1. Persamaan Hak Yang Sama Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi**

*Sumber: Pengolahan Data Peneliti 2024*

Pertanyaan	Kurang= 1		Cukup= 2		Baik= 3		Jumlah skor	Jumlah Responden	Kriteria
	F	Skor	F	Skor	F	Skor			
Menurut Bapak/Ibu/Saudara/I, Apakah ada perbedaan hak setiap komponen yang sama dalam menjalankan program keluarga harapan ?	2	2	55	110	97	291	403	154	2,61

Berdasarkan tabel 1. tersebut, diketahui bahwa persamaan hak yang sama terkait pelaksana kebijakan pemerintah program keluarga harapan di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Hasil angket menunjukkan bahwa responden memiliki kecenderungan untuk memilih alternatif jawaban baik 97 orang, meskipun ada diantara yang memilih cukup 55 orang dan untuk memilih alternatif jawaban kurang 2 orang. Peneliti berpendapat kecenderungan ini disebabkan karena responden memandang bahwa persamaan hak yang sama terkait pelaksana kebijakan pemerintah program keluarga harapan di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Dalam hal ini, hasil perhitungan menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap Dinas Sosial dan Pendamping Sosial PKH dalam persamaan hak yang sama tentang pelaksanaan program keluarga harapan ini kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki respon dengan baik, karena nilai yang diperoleh  $403:154= 2,61$  termasuk dalam kategori “baik”.

Seperti yang telah dikatakan bahwa pada persamaan hak yang sama dalam pelaksanaan program keluarga harapan Di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi sudah baik. Hal tersebut dapat diperkuat dengan pernyataan mengenai persamaan hak yang sama dalam pelaksanaan program keluarga harapan Di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dari hasil wawancara dengan Kabid Kabid Linjamsos dan PFM Di Kota Cimahi Bapak Agustus Fajar Senjaya, sebagai berikut:

“Baik, kami sudah tekankan semua terhadap pelaksana kebijakan program keluarga harapan sesuai aturan dan arahan pusat tidak membedakan antara KPM 1 dengan KPM lainnya semuanya sama, tidak melihat bahwasanya itu kerabat, keluarga ataupun yang lainnya semua sesuai dengan data yang ada””. (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2024)

Adapun selanjutnya berdasarkan informan 2 yaitu perangkat Dinas Sosial Kota Cimahi bagian Kasi Linjamsos dan PFM Di Kota Cimahi Ibu Dewi Fitri Rakhmania, beliau mengatakan:

“Tidak, boleh yah a kami sebagai dinas pun menekankan untuk tidak boleh membedakan satu dengan yang lainya disini kami tekankan untuk keadilan semua sam sesuai data komponen yang tertera” tidak melihat bahwasanya orang tersebut ada perihal pengembangan” (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2024)

Dari pernyataan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa persamaan hak yang sama dalam pelaksanaan program keluarga harapan, dengan cara melihat data komponen KPM yang sudah tertera di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa persamaan hak yang sama dapat dikatakan cukup baik, hal

tersebut berdasarkan pernyataan dari informan yaitu berdasarkan pernyataan dari informan 3 Koordinator PKH Kota Cimahi Bapak Oki Aji Pamungkas bagian Kepala Koordinator PKH Kota Cimahi yaitu, beliau mengatakan:

“Baik, a kami sudah tegaskan a petugas jangan membedakan KPM satu dengan yang lainnya ataupun KPM kelurahan A dengan kelurahan B semua sama. Saya pun sebagai ketua koordinator menekankan meskipun dia kerabat kita yang mendapat program ini jangan dibedakan akan pelayanan, edukasi dan yang lainnya semua sama jika adapun kami akan tidak lanjut”. (Wawancara pada tanggal 7 Februari 2024).

Sementara itu untuk lebih mendalam mengetahui indikator persamaan hak yang sama terkait pelaksana kebijakan pemerintah program keluarga harapan Di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi peneliti melakukan wawancara dengan melakukan wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu Ibu Rika, Ibu Rina, Ibu Leni, Ibu Henti, Ibu Siti.

Ibu Rika KPM Kelurahan Cibeber mengatakan:

“Alhamdulillah, a ga ada dibedakan-dibedakan semua diperlakukan sama baik dari komponen kesehatan, pendidikan dan yang lainnya “. (Wawancara pada tanggal 7 Februari 2024)

Ibu Rina KPM Kelurahan Leuwigajah mengatakan:

“Alhamdulillah, a semua sama yaa ga ada sampai di spesialkan ga ada sam petugas semua di rangkul sama-sama” (Wawancara pada tanggal 7 Februari 2024).

Ibu Leni KPM Kelurahan Cibeureum mengatakan:

“Ya, a semua sama aja ga ada yang dibedakan, Alhamdulillah sama pendamping semuanya di bantu tidak dibedakan dia komponen apa” (Wawancara pada tanggal 7 Februari 2024).

Ibu Henti KPM Kelurahan Utama mengatakan:

“Alhamdulillah, a tidak ada perbedaan yah kami semua sama diberikan edukasi, bimbingan, sosialisasi dan pertemuan pun semua duduk rata”. (Wawancara pada tanggal 7 Februari 2024)

Ibu Siti KPM Kelurahan Melong mengatakan:

“Alhamdulillah, ga ada sedikit pun perbedaan yah a semua sama antara komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan lainnya” (Wawancara pada tanggal 7 Februari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid, Kasi Kabid Linjamsos dan PFM Pendamping Sosial PKH ,dan Keluarga Penerima Manfaat PKH bahwa indikator persamaan hak yang sama terkait pelaksanaan kebijakan program keluarga harapan di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi sudah dilaksanakan dengan cukup baik dengan mengedukasi masyarakat melalui kegiatan P2K2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator persamaan hak yang sama terkait pelaksanaan program keluarga harapan sudah tersampaikan dengan baik di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan nilai 87,00%, yang dilakukan dengan cara melihat data komponen KPM yang sudah tertera.

#### *Pembahasan Analisis Deskriptif Variabel Implementasi Kebijakan*

Berikut hasil rekapitulasi keseluruhan indikator pada variabel kesejahteraan masyarakat:

**Tabel 2. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pada Variabel Kesejahteraan Masyarakat**

No	Indikator	Rata-Rata
1.	Adanya pemenuhan kebutuhan sandang	2,67
2.	Adanya pemenuhan kebutuhan papan	2,64
3.	Adanya pemenuhan kebutuhan pangan	2,70
4.	Taraf hidup yang berkualitas di bidang kesehatan	2,75
5.	Taraf hidup yang berkualitas di bidang pendidikan	2,59
6.	Kegiatan/edukasi yang menunjang akan pengembangan usaha	2,53
7.	Membantu kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat	2,53
8.	Persamaan hak dalam menerima bantuan program keluarga harapan	2,61

Sumber :Pengolahan Data Peneliti 2024

Berdasarkan Tabel 2. hasil deskripsi atas tanggapan responden terhadap indikator pada variabel kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan bahwa indikator tertinggi yaitu taraf hidup yang berkualitas di bidang kesehatan memperoleh nilai rata-rata 2.75, artinya dengan adanya bantuan program tersebut keluarga penerima manfaat merasa terbantu di bidang kesehatan terutama pada pencegahan angka stunting anak balita dan sudah dianggap sangat baik oleh masyarakat Di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Kemudian untuk rata-rata terendah terletak pada indikator kegiatan/edukasi yang menunjang akan pengembangan usaha tercapainya sasaran program keluarga harapan dengan memperoleh nilai rata-rata 2.53, artinya masih ada beberapa kendala terutama keluarga penerima manfaat tidak mengikuti kegiatan P2K2 di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Selanjutnya, indikator yang memperoleh nilai terendah lainnya yaitu indikator membantu kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat dengan memperoleh nilai rata-rata 2.53, artinya aparaturnya pelaksana sudah membantu keluarga penerima manfaat untuk melakukan graduasi dengan cara memberikan dana pengembangan ekonomi melalui usaha, akan tetapi keluarga penerima manfaat tidak menerima bantuan tersebut dikarenakan kebutuhan yang sangat banyak. Khususnya di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada uraian sebelumnya, diketahui bahwa tanggapan responden pada variabel Kesejahteraan Masyarakat dari dua dimensi menunjukkan hasil dengan kategori baik pada kisaran 2.34 – 3.00 dengan memperoleh skor rata-rata sebesar 2.61 atau persentase sebesar 87.00%. Dari dua dimensi nilai yang paling tinggi ada pada aspek dengan taraf hidup yang berkualitas di bidang kesehatan memperoleh nilai sebesar 2.75 dan nilai yang paling kecil pada aspek kegiatan/edukasi yang menunjang akan pengembangan usaha tercapainya sasaran program keluarga harapan kerumitan dengan nilai rata-rata sebesar 2.53.

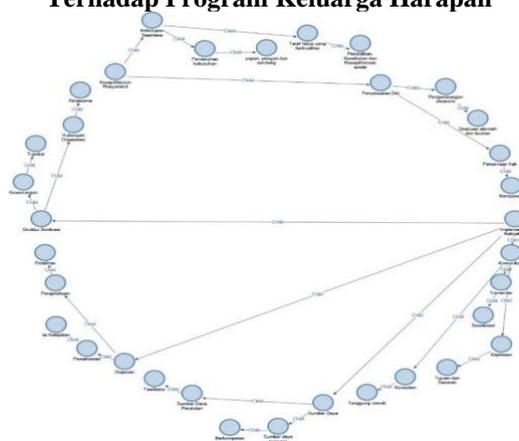
#### *Analisis Deskriptif Hubungan Keterkaitan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan program keluarga harapan di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, maka peneliti menggunakan *grand theory* dari Edwards George C. Edward III dalam (Widodo, 2021) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan Implementasi Kebijakan. Dalam hal ini, secara hasil data penelitian kuantitatif dengan mengukur keempat dimensi tersebut memiliki hasil yang berbeda di setiap dimensinya diantaranya dimensi komunikasi sebesar 2.67, sedangkan dimensi sumber daya 2,60, dimensi disposisi 2.64 dan struktur birokrasi 2.67. Keempat dimensi tersebut memiliki nilai yang memenuhi kriteria ideal.

Keberhasilan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan akan mempengaruhi kepada variabel terikat peneliti yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peneliti mengukur faktor tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan *grand theory* dari Fahrudin dalam (Mawarni, 2019) dengan memiliki 2 dimensi yaitu mencapai

kehidupan yang sejahtera dengan memiliki nilai 2.67 dan penyesuaian diri yang baik 2.56 hal ini memenuhi kriteria ideal dalam dimensi kesejahteraan masyarakat. Dapat disimpulkan secara kuantitatif adanya pengaruh Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Hal ini peneliti akan menganalisis secara kualitatif dengan didukung data primer dan data sekunder serta di generalisasi melalui aplikasi Nvivo sebagai bentuk sinkronisasi antara data secara kuantitatif dan kualitatif dapat dilihat pada gambar di bawah ini

**Gambar 1. Hubungan Keterkaitan Antara Implementasi Kebijakan dan Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Program Keluarga Harapan**



Sumber: Olahan Peneliti 2024

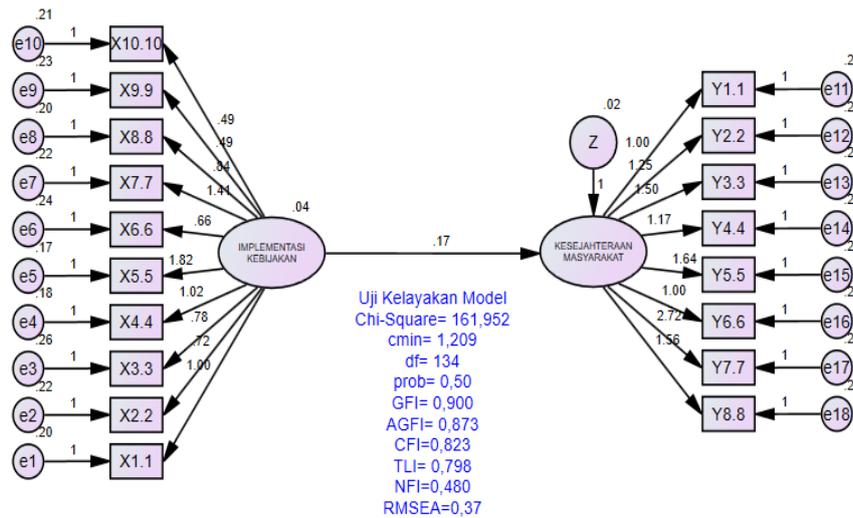
Dapat dilihat pada gambar 4. diatas dengan menggunakan aplikasi Nvivo, bahwasanya beberapa dimensi baik itu dari implementasi kebijakan ataupun kesejahteraan masyarakat saling berkaitan dengan satu sama lain, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan program keluarga harapan dapat berjalan secara optimal. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pendamping PKH seperti sosialisasi yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat terkait pemahaman isi kebijakan serta tujuan dan sasaran, yang kedua terkait fasilitas baik itu kebutuhan untuk masyarakat ataupun yang fasilitas yang menunjang terkait program tersebut dan yang terakhir hubungan kerjasama antara Dinas Sosial, Pendamping PKH, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dalam menjalankan program keluarga harapan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam hasil output dari implementasi kebijakan program keluarga harapan yaitu terkait tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat di wilayah Kecamatan Cimahi Selatan, hal ini tidak terlepas dari sikap aparatur pelaksana kebijakan program keluarga harapan dengan menekankan sikap konsisten, berkompeten, pengetahuan, pelatihan dan pengembangan. Bentuk hasil dari sikap aparatur pelaksana dalam menjalankan program keluarga harapan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pengembangan dan pelatihan ekonomi di lingkungan masyarakat dengan melakukan graduasi alamiah dan buatan, adapun pemenuhan kebutuhan pangan, pangan dan sandang. Faktor penghambat dari implementasi kebijakan program ini yaitu terkait fasilitas khusus di kelurahan cibeureum belum memadai dan faktor pendorong masyarakat dalam proses pengembangan ekonomi melalui graduasi alamiah dan buatan.

**Analisis Model Struktural (Structural Equation Modeling)**

Setelah dilakukan analisis terhadap validitas dan reliabilitas dari indikator- indikator pembentuk variabel laten, analisis selanjutnya adalah analisis Structural Equation Modeling (SEM) secara full model. Analisis hasil pengolahan data pada tahap full model SEM dilakukan dengan melakukan uji kelayakan model serta uji signifikansi kausalitas. Diagram jalur untuk analisis full model yang sudah menggugurkan indikator tidak valid disajikan sebagai berikut:

**Gambar 2. Analisis SEM Uji Amos 24.0**



Sumber: Sumber Data oleh Peneliti 2024

Sebelum menganalisis hipotesis, kesesuaian model secara keseluruhan (*overall fit models*) harus dinilai terlebih dahulu untuk menjamin bahwa model tersebut dapat menggambarkan semua pengaruh sebab akibat. Menurut (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014) pengujian kesesuaian model *goodness of fit* dilakukan dengan melihat beberapa kriteria pengukuran yaitu sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Pengujian *Goodness of fit Model*

Pengukuran <i>goodness of fit</i>	Batas penerimaan yang disarankan	Nilai	Keputusan
Chi-Square	Mendekati 0	161,952	Marjinal
Probability	≥ 0.05	0,50	<i>Goodness of fit</i>
RMSEA	≤ 0.10	0,37	<i>Poor fit</i>
GFI	≥ 0.90	0,900	Marginal
AGFI	≥ 0.90	0,873	Marginal
CMIN/DF	Batas Bawah = 1 Batas Atas = 5	1.209	<i>Goodness Of Fit</i>
TLI	≥ 0.90	0,798	Marginal
CFI	1 ≥ 0.90	0,823	Marginal

Sumber: Pengolahan Data Penelitian 2024

Berdasarkan tabel 3. di atas, dapat diketahui pada Absolute fit measures syarat utama Chi-square tidak terpenuhi, hal ini dapat dilihat dari nilainya sebesar 161.952, p-value sebesar 0.000 (di bawah 0.05), GFI sebesar 0.900 (di bawah 0.90), RMSEA dikatakan tidak terpenuhi karena nilainya sebesar 0.37 (di atas 0.10). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model sensitive terhadap jumlah sampel yang digunakan pada penelitian, artinya jumlah responden yang semakin banyak tentunya akan semakin baik.

Kriteria dari Incremental fit measure menunjukkan nilai TLI sebesar 0.798 (di bawah 0.90), nilai AGFI sebesar 0.873 (di bawah 0.90), nilai CFI sebesar 0.823 sehingga keputusan yang dicapai ialah marginal. Pengujian *goodness of fit* untuk parsimonious fit dilakukan dengan membandingkan nilai CMIN/DF dengan nilai cut-off yang memiliki kriteria batas bawah atau batas atas 5. Nilai yang diperoleh dalam pengolahan data SEM adalah 1.156. Dapat disimpulkan, nilai CMIN/DF adalah *goodness of fit* karena nilai lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 5.

Selain dilakukan pengujian *goodness of fit model*, bobot faktor yang tertera pada hasil pengujian juga merupakan bagian yang paling penting karena dapat menggambarkan bagaimana indikator-indikator pengukuran yang diukur mampu menjelaskan variabel yang dikonsepskan. Berikut rekapitulasi bobot faktor yang tertera pada model:

**Tabel 4. Rekapitulasi Bobot Faktor Pengujian Model Struktural**

			Estimate
Kesejahteraan_Masyarakat	<---	Implementasi_Kebijakan	,371
X1.1	<---	Implementasi_Kebijakan	1,000
X2.2	<---	Implementasi_Kebijakan	,724
X3.3	<---	Implementasi_Kebijakan	,777
X4.4	<---	Implementasi_Kebijakan	1,016
X5.5	<---	Implementasi_Kebijakan	1,824
X6.6	<---	Implementasi_Kebijakan	,656
X7.7	<---	Implementasi_Kebijakan	1,411
X8.8	<---	Implementasi_Kebijakan	,843
X9.9	<---	Implementasi_Kebijakan	,492
X10.10	<---	Implementasi_Kebijakan	,486
Y1.1	<---	Kesejahteraan_Masyarakat	1,000
Y2.2	<---	Kesejahteraan_Masyarakat	1,247
Y3.3	<---	Kesejahteraan_Masyarakat	1,502
Y4.4	<---	Kesejahteraan_Masyarakat	1,166
Y5.5	<---	Kesejahteraan_Masyarakat	1,642
Y6.6	<---	Kesejahteraan_Masyarakat	,998
Y7.7	<---	Kesejahteraan_Masyarakat	2,723
Y8.8	<---	Kesejahteraan_Masyarakat	1,560

Sumber: Pengolahan Data oleh Peneliti 2024

Tabel 4. merupakan rekapitulasi bobot faktor pada masing-masing variabel dalam penelitian ini. Hasil yang ditampilkan pada tabel secara umum memenuhi kriteria valid yaitu di atas nilai 0.3.

Dari pengukuran untuk uji kesesuaian model, dapat ditarik kesimpulan bahwa model pengujian layak, karena ada beberapa item yang mencapai kriteria *marginal fit* dan bahkan memenuhi kriteria *goodness of fit*. Model yang telah lulus uji *goodness of fit*, dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya yang berupa uji hipotesis.

**Analisis Uji Hipotesis**

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai analisis pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan software AMOS Versi 24.0 yang merupakan suatu metode statistik yang sesuai untuk penelitian ini. Tujuan dari metode ini adalah untuk memprediksi perubahan-perubahan dalam variabel terikat (*dependent/criterion variable*) dikaitkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sejumlah variabel bebas (*independent/predictor variable*).

- Jika p-value > 0.05 maka Ho ditolak.
- Jika p-value < 0.05 maka Ho gagal ditolak (diterima).

Berikut tabel yang memuat rekapitulasi hasil pengujian model struktural dengan variabel konstruksi yang menunjukkan pengaruh antara implementasi kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan teknik analisis *Structural Equation Modeling (SEM)*:

**Tabel 5. Regression Weight Hasil Pengujian Hipotesis**

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Kesejahteraan_Masyarakat	<	Implementasi_Kebijakan	1,71	,116	1,149	0,04	
	--						

Sumber: Pengolahan Data oleh Peneliti Tahun 2024

Pada Tabel 5. dari hasil output SEM AMOS, maka diperoleh persamaan koefisien regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$y = a + bx$$

di mana:

Y : Variabel tidak bebas (Kesejahteraan Masyarakat)

X : Variabel bebas (Implementasi Kebijakan)

Nilai koefisien efektivitas pelayanan administrasi kependudukan (Y) adalah 1,71 artinya jika variabel implementasi kebijakan (X) meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi konstanta adalah 0 (nol), maka kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan akan meningkat sebesar 1,71 satuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan yang disediakan Kecamatan Cimahi Selatan berkontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga semakin optimal implementasi kebijakan program keluarga harapan yang disediakan oleh Kecamatan Cimahi Selatan, maka semakin tinggi kesejahteraan masyarakat.

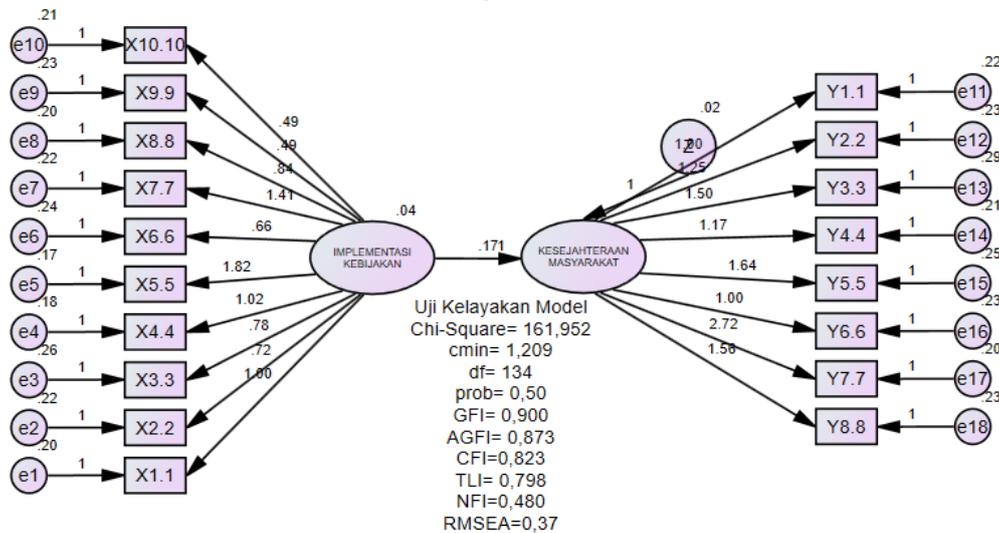
Setelah dilakukan pengolahan data maka diperoleh persamaan regresi linier berdasarkan tabel di atas, hasil uji hipotesis variabel implementasi kebijakan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, menunjukkan nilai estimate sebesar positif 1.71 dan p-value sebesar 0.04 ( $< 0.05$ ), sehingga dapat diambil keputusan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti implementasi kebijakan berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan administrasi kependudukan, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi kebijakan program keluarga harapan maka akan semakin baik kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya untuk menguji apakah implementasi kebijakan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, berikut merupakan penyusunan hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatifnya ( $H_a$ ):

- $H_0 : \rho = 0$ : Implementasi Kebijakan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat
- $H_a : \rho \neq 0$  : Implementasi Kebijakan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat

Berikut gambar hasil pengukuran model struktural keseluruhan yang dilakukan dengan melakukan uji kelayakan model serta uji signifikansi kausalitas:

**Gambar 3. Rekapitulasi Model Struktural Variabel Implementasi Kebijakan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**



Sumber: Pengolahan Data oleh Peneliti Tahun 2024

Pada Gambar 3. menunjukkan koefisien korelasi di antara dua variabel dan dijadikan acuan adanya tingkat hubungan antara variabel implementasi kebijakan program keluarga harapan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai korelasi sebesar 1.71. Hal ini menunjukkan bahwa arah hubungan implementasi kebijakan program keluarga harapan terhadap kesejahteraan masyarakat berkontribusi positif, artinya semakin optimal implementasi kebijakan program keluarga harapan (X) yang disediakan oleh Dinas Sosial dan Pendamping Sosial PKH maka akan semakin tinggi kesejahteraan masyarakat (Y).

Selanjutnya hasil pengolahan data untuk model struktural variabel laten bebas implementasi kebijakan sebagai berikut:

**Tabel 6. Model Pengukuran Untuk Variabel Implementasi Kebijakan**

No	Persamaan	Nilai Korelasi	Nilai r <sup>2</sup>	p-value
1	X1.1 ⇔ X	1.00	0.15	***
2	X1.2 ⇔ X	0.72	0.80	***
3	X1.3 ⇔ X	0.78	0.77	***
4	X1.4 ⇔ X	1.02	0.17	***
5	X1.5 ⇔ X	1.82	0.40	***
6	X1.6 ⇔ X	0.66	0,61	***
7	X1.7 ⇔ X	1.41	0,24	***
8	X1.8 ⇔ X	0.84	0.11	***
9	X1.9 ⇔ X	0.49	0.37	***
10	X1.10 ⇔ X	0.49	0.38	***

Sumber: Pengolahan Data oleh Peneliti Tahun 2024

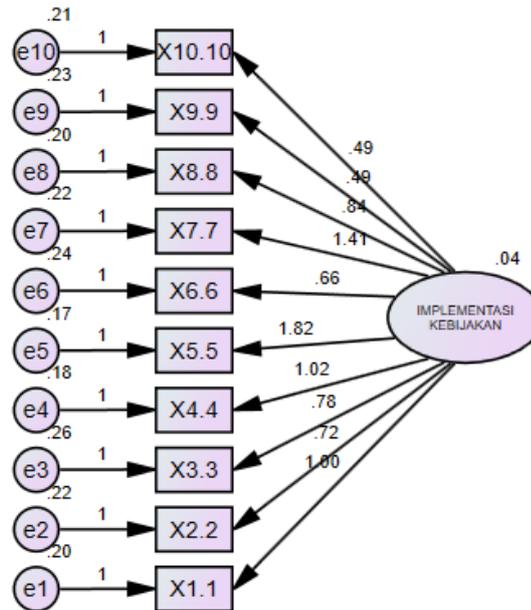
Berdasarkan Tabel 6. dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koefisien Standardized antara variabel implementasi kebijakan dengan dimensi komunikasi (X1.1) nilai  $r = 1.00$  ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel inovasi pelayanan dengan dimensi komunikasi, karena nilai kontribusi lebih dari 0, maka terjadi hubungan linier yang positif yang artinya jika nilai inovasi pelayanan semakin besar maka semakin besar pula dimensi kemanfaatannya. Selanjutnya untuk nilai koefisien determinasinya sebesar 0.15%, dan p-value sebesar \*\*\* atau 0.000 karena  $0.00 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh antara implementasi kebijakan dengan dimensi komunikasi.
2. Koefisien Standardized antara variabel inovasi pelayanan dengan dimensi komunikasi (X1.2) nilai  $r = 0.72$  ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel implementasi kebijakan dengan dimensi komunikasi, karena nilai kontribusi lebih dari 0, maka terjadi hubungan linier yang positif yang artinya jika nilai implementasi kebijakan semakin besar maka semakin besar pula dimensi komunikasi. Selanjutnya untuk nilai koefisien determinasinya sebesar 0.80%, dan p-value sebesar \*\*\* atau 0.000 karena  $0.00 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh antara implementasi kebijakan dengan dimensi komunikasi.
3. Koefisien Standardized antara variabel implementasi kebijakan dengan dimensi komunikasi (X1.3) nilai  $r = 0.78$  ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel implementasi kebijakan dengan dimensi komunikasi, karena nilai kontribusi lebih dari 0, maka terjadi hubungan linier yang positif yang artinya jika nilai implementasi kebijakan semakin besar maka semakin besar pula dimensi komunikasi. Selanjutnya untuk nilai koefisien determinasinya sebesar 0.77%, dan p-value sebesar \*\*\* atau 0.000 karena  $0.00 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh antara implementasi kebijakan dengan dimensi komunikasi.
4. Koefisien Standardized antara variabel implementasi kebijakan dengan dimensi komunikasi (X1.4) nilai  $r = 1.02$  ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel implementasi kebijakan dengan dimensi komunikasi, karena nilai kontribusi lebih dari 0, maka terjadi hubungan linier yang positif yang artinya jika nilai implementasi kebijakan semakin besar maka semakin besar pula dimensi komunikasi. Selanjutnya untuk nilai koefisien determinasinya sebesar 0.17%, dan p-value sebesar \*\*\* atau 0.000 karena  $0.00 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh antara implementasi kebijakan dengan dimensi komunikasi.
5. Koefisien Standardized antara variabel implementasi kebijakan dengan dimensi sumber daya (X1.5) nilai  $r = 1.82$  ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel implementasi kebijakan dengan dimensi sumber daya, karena nilai kontribusi lebih dari 0, maka terjadi hubungan linier yang positif yang artinya jika nilai implementasi kebijakan semakin besar maka semakin besar pula dimensi sumber daya. Selanjutnya untuk nilai koefisien determinasinya sebesar 0.40%, dan p-value sebesar \*\*\*

- atau 0.000 karena  $0.00 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh antara implementasi kebijakan dengan dimensi sumber daya.
6. Koefisien Standardized antara variabel implementasi kebijakan dengan dimensi sumber daya (X1.6) nilai  $r = 0.66$  ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel implementasi kebijakan dengan dimensi sumber daya, karena nilai kontribusi lebih dari 0, maka terjadi hubungan linier yang positif yang artinya jika nilai implementasi kebijakan semakin besar maka semakin besar pula dimensi sumber daya. Selanjutnya untuk nilai koefisien determinasinya sebesar 0.61%, dan p-value sebesar \*\*\* atau 0.000 karena  $0.00 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh antara implementasi kebijakan dengan dimensi sumber daya.
  7. Koefisien Standardized antara variabel implementasi kebijakan dengan dimensi disposisi (X1.7) nilai  $r = 1.41$  ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel implementasi kebijakan dengan dimensi disposisi, karena nilai kontribusi lebih dari 0, maka terjadi hubungan linier yang positif yang artinya jika nilai implementasi kebijakan semakin besar maka semakin besar pula dimensi disposisi. Selanjutnya untuk nilai koefisien determinasinya sebesar 0.24%, dan p-value sebesar \*\*\* atau 0.000 karena  $0.00 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh antara implementasi kebijakan dengan dimensi disposisi.
  8. Koefisien Standardized antara variabel implementasi kebijakan dengan dimensi disposisi (X1.8) nilai  $r = 1.41$  ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel implementasi kebijakan dengan dimensi disposisi, karena nilai kontribusi lebih dari 0, maka terjadi hubungan linier yang positif yang artinya jika nilai implementasi kebijakan semakin besar maka semakin besar pula dimensi disposisi. Selanjutnya untuk nilai koefisien determinasinya sebesar 0.24%, dan p-value sebesar \*\*\* atau 0.000 karena  $0.00 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh antara implementasi kebijakan dengan dimensi disposisi.
  9. Koefisien Standardized antara variabel implementasi kebijakan dengan dimensi struktur birokrasi (X1.9) nilai  $r = 0.49$  ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel implementasi kebijakan dengan dimensi struktur birokrasi, karena nilai kontribusi lebih dari 0, maka terjadi hubungan linier yang positif yang artinya jika nilai implementasi kebijakan semakin besar maka semakin besar pula dimensi struktur birokrasi. Selanjutnya untuk nilai koefisien determinasinya sebesar 0.37%, dan p-value sebesar \*\*\* atau 0.000 karena  $0.00 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh antara implementasi kebijakan dengan dimensi struktur birokrasi.
  10. Koefisien Standardized antara variabel implementasi kebijakan dengan dimensi struktur birokrasi (X1.10) nilai  $r = 0.49$  ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel implementasi kebijakan dengan dimensi struktur birokrasi, karena nilai kontribusi lebih dari 0, maka terjadi hubungan linier yang positif yang artinya jika nilai implementasi kebijakan semakin besar maka semakin besar pula dimensi struktur birokrasi. Selanjutnya untuk nilai koefisien determinasinya sebesar 0.38%, dan p-value sebesar \*\*\* atau 0.000 karena  $0.00 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh antara implementasi kebijakan dengan dimensi struktur birokrasi.

Berikut peneliti sajikan gambar hasil pengukuran model struktural variabel laten bebas implementasi kebijakan:

Gambar 4. Model Struktural Variabel Implementasi Kebijakan



Sumber: Pengolahan Data oleh Peneliti Tahun 2024

Selanjutnya hasil pengolahan data untuk variabel laten kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

Tabel 7. Model Pengukuran Untuk Variabel Kesejahteraan Masyarakat

No	Persamaan	Nilai Korelasi	Nilai r <sup>2</sup>	p-value
1	Y1.1 ⇔ Y	1.00	0.74	***
2	Y1.2 ⇔ Y	1.25	0.10	***
3	Y1.3 ⇔ Y	1.50	0.12	***
4	Y1.4 ⇔ Y	1.17	0.10	***
5	Y1.5 ⇔ Y	1.64	0.16	***
6	Y1.6 ⇔ Y	1.00	0,72	***
7	Y1.7 ⇔ Y	2.72	0,39	***
8	Y1.8 ⇔ Y	1.56	0.15	***

Sumber: Pengolahan Data oleh Peneliti Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 7. dapat dijelaskan sebagai berikut:

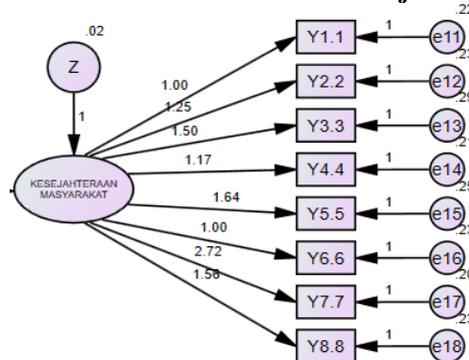
1. Koefisien Standardized antara variabel kesejahteraan masyarakat dengan dimensi mencapai kehidupan yang sejahtera (Y1.1) nilai  $r = 1.00$  ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel kesejahteraan masyarakat dengan dimensi mencapai kehidupan yang sejahtera, karena nilai kontribusi lebih dari 0, maka terjadi hubungan linier yang positif yang artinya jika nilai kesejahteraan masyarakat semakin besar maka semakin besar pula dimensi mencapai kehidupan yang sejahtera. Selanjutnya untuk nilai koefisien determinasinya sebesar 0.74%, dan p-value sebesar \*\*\* atau 0.000 karena  $0.00 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh antara kesejahteraan masyarakat dengan dimensi mencapai kehidupan yang sejahtera.
2. Koefisien Standardized antara variabel kesejahteraan masyarakat dengan dimensi mencapai kehidupan yang sejahtera (Y1.2) nilai  $r = 1.25$  ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel kesejahteraan masyarakat dengan dimensi mencapai kehidupan yang sejahtera, karena nilai kontribusi lebih dari 0, maka terjadi hubungan linier yang positif yang artinya jika nilai kesejahteraan masyarakat semakin besar maka semakin besar pula dimensi mencapai kehidupan yang sejahtera. Selanjutnya untuk nilai koefisien determinasinya sebesar 0.10%, dan p-value sebesar \*\*\* atau 0.000 karena  $0.00 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh antara kesejahteraan masyarakat dengan dimensi mencapai kehidupan yang sejahtera.

3. Koefisien Standardized antara variabel kesejahteraan masyarakat dengan dimensi mencapai kehidupan yang sejahtera (Y1.3) nilai  $r = 1.50$  ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel kesejahteraan masyarakat dengan dimensi mencapai kehidupan yang sejahtera, karena nilai kontribusi lebih dari 0, maka terjadi hubungan linier yang positif yang artinya jika nilai kesejahteraan masyarakat semakin besar maka semakin besar pula dimensi mencapai kehidupan yang sejahtera. Selanjutnya untuk nilai koefisien determinasinya sebesar 0.12%, dan p-value sebesar \*\*\* atau 0.000 karena  $0.00 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh antara kesejahteraan masyarakat dengan dimensi mencapai kehidupan yang sejahtera.
4. Koefisien Standardized antara variabel kesejahteraan masyarakat dengan dimensi mencapai kehidupan yang sejahtera (Y1.4) nilai  $r = 1.17$  ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel kesejahteraan masyarakat dengan dimensi mencapai kehidupan yang sejahtera, karena nilai kontribusi lebih dari 0, maka terjadi hubungan linier yang positif yang artinya jika nilai kesejahteraan masyarakat semakin besar maka semakin besar pula dimensi mencapai kehidupan yang sejahtera. Selanjutnya untuk nilai koefisien determinasinya sebesar 0.10%, dan p-value sebesar \*\*\* atau 0.000 karena  $0.00 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh antara kesejahteraan masyarakat dengan dimensi mencapai kehidupan yang sejahtera.
5. Koefisien Standardized antara variabel kesejahteraan masyarakat dengan dimensi mencapai kehidupan yang sejahtera (Y1.5) nilai  $r = 1.64$  ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel kesejahteraan masyarakat dengan dimensi mencapai kehidupan yang sejahtera, karena nilai kontribusi lebih dari 0, maka terjadi hubungan linier yang positif yang artinya jika nilai kesejahteraan masyarakat semakin besar maka semakin besar pula dimensi mencapai kehidupan yang sejahtera. Selanjutnya untuk nilai koefisien determinasinya sebesar 0.16%, dan p-value sebesar \*\*\* atau 0.000 karena  $0.00 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh antara kesejahteraan masyarakat dengan dimensi mencapai kehidupan yang sejahtera.
6. Koefisien Standardized antara variabel kesejahteraan masyarakat dengan dimensi mencapai penyesuaian diri yang baik (Y1.6) nilai  $r = 1.00$  ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel kesejahteraan masyarakat dengan dimensi mencapai penyesuaian diri yang baik, karena nilai kontribusi lebih dari 0, maka terjadi hubungan linier yang positif yang artinya jika nilai kesejahteraan masyarakat semakin besar maka semakin besar pula dimensi penyesuaian diri yang baik. Selanjutnya untuk nilai koefisien determinasinya sebesar 0.72%, dan p-value sebesar \*\*\* atau 0.000 karena  $0.00 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh antara kesejahteraan masyarakat dengan dimensi mencapai penyesuaian diri yang baik.
7. Koefisien Standardized antara variabel kesejahteraan masyarakat dengan dimensi mencapai penyesuaian diri yang baik (Y1.7) nilai  $r = 2.72$  ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel kesejahteraan masyarakat dengan dimensi mencapai penyesuaian diri yang baik, karena nilai kontribusi lebih dari 0, maka terjadi hubungan linier yang positif yang artinya jika nilai kesejahteraan masyarakat semakin besar maka semakin besar pula dimensi penyesuaian diri yang baik. Selanjutnya untuk nilai koefisien determinasinya sebesar 0.39%, dan p-value sebesar \*\*\* atau 0.000 karena  $0.00 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh antara kesejahteraan masyarakat dengan dimensi mencapai penyesuaian diri yang baik.
8. Koefisien Standardized antara variabel kesejahteraan masyarakat dengan dimensi mencapai penyesuaian diri yang baik (Y1.8) nilai  $r = 1.56$  ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel kesejahteraan masyarakat dengan dimensi mencapai penyesuaian diri yang baik, karena nilai kontribusi lebih dari 0, maka terjadi hubungan linier yang positif yang artinya jika nilai kesejahteraan masyarakat semakin besar maka semakin besar pula dimensi penyesuaian diri yang baik. Selanjutnya untuk nilai koefisien

determinasinya sebesar 0.15%, dan p-value sebesar \*\*\* atau 0.000 karena  $0.00 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh antara kesejahteraan masyarakat dengan dimensi mencapai penyesuaian diri yang baik.

Berikut peneliti sajikan gambar hasil pengukuran model struktural variabel laten bebas kesejahteraan masyarakat:

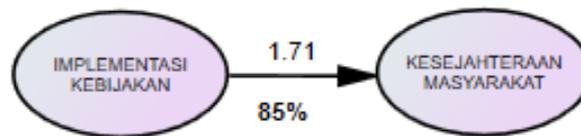
**Gambar 5. Model Struktural Variabel Kesejahteraan Masyarakat**



Sumber: Pengolahan Data oleh Peneliti Tahun 2024

Selanjutnya peneliti sajikan gambar hasil pengukuran model struktural pengaruh langsung variabel implementasi kebijakan inovasi pelayanan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

**Gambar 6. Model Struktural Pengaruh Langsung Variabel Implementasi Kebijakan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**



Sumber: Pengolahan Data oleh Peneliti Tahun 2024

Pada Gambar 4.9 menunjukkan hasil koefisien korelasi di antara dua variabel, adanya pengaruh langsung antara variabel implementasi kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai korelasi sebesar 1,71 dan besar pengaruh sebesar 0.85 atau 85% di lihat dari Standar Estimate (S.E) artinya arah hubungan implementasi kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat berkontribusi positif, semakin lengkap implementasi kebijakan (X) yang disediakan oleh Dinas Sosial dan Pendamping Sosial PKH Kecamatan Cimahi Selatan maka akan semakin besar pula kesejahteraan masyarakat (Y).

### **Pembahasan Analisis Implementasi Kebijakan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diketahui bahwa implementasi kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari hasil perhitungan p-value sebesar 0.04 ( $< 0.05$ ). Koefisien regresi implementasi kebijakan berkontribusi dengan nilai positif, artinya semakin optimal implementasi kebijakan (X) yang disediakan oleh Dinas Sosial dan Pendamping Sosial PKH maka akan semakin besar pula kesejahteraan masyarakat (Y), dapat dilihat dari besaran pengaruh variabel implementasi kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0.85 atau 85%.

Adapun nilai 0.17 atau 17% yang sisanya yaitu kekurangan dari nilai yang tidak optimal dalam melakukan pengembangan ekonomi melalui graduasi baik secara alamiah maupun buatan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti halnya; sumber daya manusia yang masih kurang termotivasi dalam melakukan graduasi dikarenakan faktor kegagalan dalam berdagang, berwirausaha dan yang lainnya dan terkait fasilitas yaitu tempat dalam melakukan kegiatan P2K2 yang belum memadai bagi PKM Cibeureum yang akan mempengaruhi dalam

proses pemberdayaan masyarakat terkait ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

## KESIMPULAN

Dari hasil pengolahan data dari bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian secara kuantitatif, variabel implementasi kebijakan program PKH di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi berada pada kategori baik. Hal tersebut dapat dilihat dari variabel implementasi kebijakan program PKH di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi diperoleh nilai sebesar (2.64) karena berada dalam interval skor 2.34–3.00 ini artinya bahwa implementasi kebijakan program PKH di Kecamatan Cimahi Selatan Kota yang dijalankan sudah berjalan dengan baik. Dari keempat dimensi yang mengukur variabel inovasi pelayanan diketahui aspek komunikasi dan struktur birokrasi yang mendapatkan penilaian paling tinggi (2.67) sedangkan aspek sumber daya mendapatkan penilaian yang paling rendah (2.60).
2. Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Prorgam Keluarga Harapan sudah berjalan dengan baik akan tetapi, ada hal yang perlu di perhatikan terutama dalam dimensi sumber daya terkait fasilitas khususnya di wilayah Kelurahan Cibeureum yang belum memadai serta memberikan motivasi kepada masyarakat dalam proses pengembangan ekonomi melalui graduasi alamiah dan buatan.
3. Berdasarkan hasil penelitian secara kuantitatif, variabel kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi berada pada kategori baik. Hal tersebut dapat dilihat dari variabel kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi diperoleh nilai sebesar (2.63) karena berada dalam interval skor 2.34–3.00 ini artinya bahwa kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi yang dijalankan sudah berjalan dengan baik. Dari dua dimensi yang mengukur variabel kesejahteraan masyarakat diketahui aspek mencapai kehidupan sejahtera (2.65) yang mendapatkan penilaian paling tinggi sedangkan aspek penyesuaian diri yang baik (2.61) mendapatkan penilaian yang paling rendah.
4. Kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cimhi Selatan sudah berjalan dengan baik akan tetapi, ada yang perlu diperhatikan terkait pengembangan diri pada masyarakat terkait pelaksanaan graduasi alamiah dan buatan melalui program P2K2 yang belum berjalan secara optimal akan mempengaruhi kepada kesejahteraan masyarakat yang ada di Kecamatan Cimahi Selatan
5. Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan software AMOS Versi 24.0 nilai hasil uji hipotesis yaitu sebesar 0.04. Adapun ketentuan dalam penghitungan uji hipotesis yaitu; jika  $p\text{-value} > 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan jika  $p\text{-value} < 0.05$  maka  $H_0$  gagal ditolak (diterima). Sehingga hipotesis menunjukkan dapat diterima.
6. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh implementasi kebijakan program PKH terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi sebesar 0.85 atau 85%.

Dengan demikian hipotesis yang diajukan oleh peneliti, bahwa Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan manajerial Kepala Desa berdasarkan indikator implementasi kebijakan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

## REFERENSI

- Agustino, L.,2022. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta CV
- Alisa, S., Adriansah, & Oktriawan, W. (2022). Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Campakasari Kecamatan Cempaka Kabupaten Purwakarta. Jurnal Mutaqqien, 1-14.

- Arfah, A., Semmaila, B., & Tahrir, M. I. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Takalar. *Management Science*, 62-81.
- Badan Pusat Statistik. (2023 juni rabu). Indikator Kesejahteraan Masyarakat 2020. Retrived from <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/30/5d97da0e92542a75d3cace48/indikator-kesejahteraan-rakyat-2020.html> bps.go.id:
- Creswell, J. W. (2017). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Database Konsolidasi Bersih Semester I 2023 Kota Cimahi
- Fachrudin, A. (2018). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Frinaldi, A., & Handani, M. S. (2020). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Pada SMP Negeri Kota Padang. *Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 73-86.
- Gunawan, W., 2020. *Kamus Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bee Media Pustaka
- Hair, J.F. et. al. 2014. *Multivariate Data Analysis*. 7th Edition. Pearson Education Limited.
- Hamrin, & Tanjung, A. (2020). Politik Hukum Pemekaran Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *National Law Journal*, 187-199.
- Herdiawan, G., Agiati, R. E., & Indrakentjana, B. (2022). Respon Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Terhadap Program Graduasi Mandiri Di Kelurahan Karangmekar Cimahi Tengah. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, 157-177.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers
- Jalilah, Ayumiati, & Amalia, M. (2020). Analisis Implementasi Cooperate Social Responsibility Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Pada Program Bantuan Bina Lingkungan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Banda Aceh. *Islami banking dan finance*, 109-131.
- Jannag, R. (2019). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur ( Sarjana Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) Kecamatan Cimahi Selatan Dalam Angka Tahun 2023
- Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)
- Kline, R. (2010). *Principles and Practice of Structural Equation Modeling*. New York: The Guilford Press
- Kompasiana.com (2023, 15 Januari).Pemberlakuan 2 Shift Disebabkan Ketidakseimbangan Ruang Kelas Dengan Jumlah Siswa. Diakses pada (2023, 31 MEI) dari Kompasian: <https://www.kompasiana.com/inntanputri/63c3087108a8b53f2a356a54/pemberlakuan-2-shift-disebabkan-ketidakseimbangan-ruang-kelas-dengan-jumlah-siswa-di-kota-cimahi>
- Mawarni, K. S. (2019). Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Di Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. *Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 56-66.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Nain, U. (2017). *Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R., 2021. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Nuraeni, D. (2021). Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan oleh Dinas Sosial Terhadap Pencapaian Sasaran Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan

- Margahayu Kabupaten Bandung ( Sarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Jenderal Achmad Yani).
- Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021  
Pemerintah Daerah Kota Cimahi. (2022). Statistik Geografi dan Iklim Kota Cimahi. Pemerintah Daerah Kota Cimahi. <https://cimahikota.go.id/geografi>
- Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
- Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Sosial Kota Cimahi
- Ridhahani. (2020). Metodologi Penelitian Dasar Bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula. Banjarmasin: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari
- Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Kota Cimahi 2022
- Ruslan, & Kurbani, A. (2020). Pengaruh Pengawasan Dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. *Jurnal Manivestasi*, 94-111
- Safitri, & Andika, S. (2021). Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Persepektif Ekonomi Islam. *Shariah and Islamic Economics*, 44-55.
- Sindonews.com (2023, 1 Februari). Imbas Pandemi Di Tahun 2021, Warga Miskin Di Cimahi Capai 32.480 Jiwa Diakses pada (2024, 10 Januari) dari Sindonews: <https://daerah.sindonews.com/read/673095/701/imbaspandemi-di-tahun-2021-wargamiskindicimahi-capai-32480-jiwa-1643662979>
- Siwu, H., Lapihan, A., & Tungkulele, L. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 25-36.
- Statistik, B. P. (2023). Persentase Penduduk Miskin September 2022 Naik Menjadi 9, 57 Persen. Badan Pusat Statistik.
- Subakti, H. P., Yuliana, K., Yuliana, K. R., & Musywarofah, S. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (S Bahri, Ed). Bandung: Media Sains Indonesia.
- Subianto, A. 2020. Kebijakan Publik. Surabaya: Brilliant
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suherman, A. (2018, Februari). Pengaruh Sosialisasi Partai Politik Terhadap Partisipasi Pemilih umum Pada Pemilihan Bupati 2017 Di Kelurahan Busoa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 27-43
- Sukarendra, I. K., & Atmaja, I. S. (2020). Instrumen Penelitian. Bali: Mahameru Press.
- Sukmana, H., & Ningrum, P. W. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tanjanganro Kecamatan Tanjanganro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. *Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 87-99.
- Sumaryadi, I. N. (2018). Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia
- Syafiie, I. K. (2018). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tachjan, 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Widodo, J., 2021. Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. 12nd ed. Malang: Media Nusa Creative
- Yulhendri, & Susanti, N. (2017). Analisis Konfirmatory Faktor Pengukuran Indikator Kesejahteraan Rumah Tangga. *Ilmiah Ecosains*, 185-201.
- Yustina. (2021). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu (Universitas Muhammadiyah Makasar)